

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersifat strategis di Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi urusan pendidikan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi maka penamaan nomenklatur Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan dengan diterbitkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ^[1].

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pada perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, yang akan berdampak pada peralihan penanganan pelayanan termasuk didalamnya adalah urusan pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan dibidang pendidikan untuk jenjang sekolah menengah atas dan pendidikan khusus sehingga dalam hal ini kewenangan yang menjadi ranah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) unit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta sebanyak 56 (lima puluh enam) unit dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swata sebanyak 9 (Sembilan) unit.

Dengan jumlah satuan pendidikan yang begitu banyak hal ini harus berbanding lurus dengan jumlah pegawai yang tersedia berupa tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang disiapkan dalam memberikan layanan dibidang pendidikan yang maksimal dan merupakan ujung tombak dalam kesuksesan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain pendapatan resmi yang telah ditentukan oleh negara sesuai dengan peraturan yang ada, berbagai fasilitas tambahan telah disiapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pendidikan kepada para pegawai negeri sipil yang mengabdikan dirinya pada pelayanan diseluruh satuan pendidikan dan salah satunya adalah dana bantuan KORPRI.

KORPRI (Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia) merupakan organisasi resmi dan menjadi tempat berhimpun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara defacto adalah bagian yang diakui secara undang-undang dari Pemerintahan, KORPRI berdiri tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia sehingga dalam hal ini setiap ASN yang baru diangkat secara otomatis akan menjadi anggota KORPRI dengan salah satu kewajibannya adalah pembayaran iuran keanggotaan dengan besaran dana sudah diatur dalam surat edaran. Adapun salah satu pemanfaatan dana iuran tersebut adalah berupa bantuan dana tali asih kepada anggota KORPRI dengan kriteria bantuan telah diatur dalam edaran yang diterbitkan berupa sakit, meninggal dan kelahiran dan lain-lain dengan besaran dana ditetapkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Program ini sangat membantu anggotanya yang sedang mengalami musibah sehingga menjadi terbantu dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan yang tersebar di satuan pendidikan juga mengambil peran yang sama dalam mensukseskan program ini. Sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan layanan permohonan pengajuan dana bantuan KORPRI bagi ASN yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik yang ada di kantor dinas pendidikan, cabang dinas pendidikan maupun ASN yang ada di satuan pendidikan.

Dalam standar operasional prosedurnya dana bantuan KORPRI berupa tali asih ini dapat diperoleh dengan membuat permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melengkapi berbagai berkas pendukung sehingga proses persetujuan dalam diambil dengan cepat. Dokumen dapat disampaikan secara langsung maupun melalui paket pengiriman

jika tidak memungkinkan untuk disampaikan secara langsung.

Seiring perkembangan teknologi yang melesat dan dinamis saat ini, dimungkinkan dapat digunakan untuk diterapkan dalam peningkatan layanan pengajuan dana KORPRI ini sehingga proses pengajuan berjalan lebih cepat serta dapat memangkas waktu dan biaya yang timbul akibat dari perjalanan pegawai maupun biaya pengiriman. Selain itu dengan memanfaatkan dunia maya ini, mekanisme pelaporan dan pemantauan penggunaan dana KORPRI yang selama ini masih konvensional sehingga terkesan tidak transparan dapat disajikan lebih menarik dan akuntabilitas.

Dalam prakteknya selama ini, penyajian laporan penggunaan dana KORPRI ini selalu menjadi kendala karena kurangnya kompetensi pegawai baik dalam hal inovasi dan pengarsipan berkas sehingga penyediaan data yang diperlukan menjadi sulit disajikan dan melalui aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan semua pihak dalam memberi dan menerima layanan yang dibutuhkan.

Solusi dari gambaran masalah yang telah diuraikan di atas mendorong penulis untuk membuat sebuah penelitian dengan judul, **PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN KORPRI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BERBASIS WEB.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang latar belakang yang telah di uraikan diatas, berikut ini adalah rumusan masalah yang akan menjadi pokok penelitian yaitu bagaimana merancang sebuah sistem yang aplikatif dalam hal pengelolaan dana bantuan KORPRI dengan mengedepankan :

1. Bagaimana membuat proses pengajuan dana bantuan KORPRI yang mudah dan flexibe bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada pada lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bagaimana membuat proses pengajuan yang hemat biaya sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan dengan singkat.
3. Bagaimana membuat proses pengajuan yang hemat waktu sehingga dapat

cepat meringankan beban pegawai yang mengajukan.

4. Penyajian laporan penggunaan dana bantuan KORPRI yang akuntabilitas dan transparan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah penelitian diantaranya adalah :

1. Tidak membahas pengelolaan tahap-tahap cara pengajuan yang ada pada operator unit, sehingga operator unit hanya mengajukan pada aplikasi mekanisme dengan pemberkasan yang telah lengkap.
2. Tidak membahas mekanisme tata acara ataupun tahap validasi yang ada pada operator Korpri, sehingga disini keputusan setuju atau tidak setuju adalah point yang akan menjadi pembahasan.
3. Tidak membahas mekanisme proses penyampaian bukti cair yang ada pada operator unit kepada pegawai yang mengajukan.
4. Rancangan sistem informasi ini menggunakan aplikasi UI/UX.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini sangat berdampak besar sekali dalam pengelolaan dana bantuan KORPRI pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya:

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Dengan menggunakan sistem web yang terkomputerisasi, proses pengajuan dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien dan cepat.
2. Pengambilan keputusan oleh para pengambil kebijakan dapat dilaksanakan dengan segera dan maksimal sehingga dapat menghemat waktu.
3. Pemantauan perkembangan pengajuan dapat diakses kapan saja, tanpa harus berhubungan langsung dengan operator dinas.

4. Penyajian laporan dapat diimplementasikan secara baik dan periodic, sehingga menjadi presensi tersendiri bagi atasan dalam pengambilan kebijakan
5. Proses pengajuan menjadi lebih akuntabel dan sesuai dengan visi misi tentang layanan public yang baik.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. dapat menekan biaya perjalanan maupun pengiriman berkas.
2. nilai bantuan dapat dilaporkan secara berkala dan dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan.
3. penyajian laporan yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya;
4. terkelolanya arsip yang disimpan secara digital.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang di buat dalam tugas akhir ini disusun beberapa bab, yang di jelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang kemudian dijabarkan dalam sebuah rumusan permasalahan dikunci dengan tinjauan batas penelitian sehingga proses penelitian tidak menjadi lebih luas dan melebar. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian, serta model penulisan sistematik yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi landasan teori yang mencakup teori pendukung serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perancangan sistem informasi pengelolaan bantuan KORPRI pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang model pengembangan sistem dan instrument alat bantu yang digunakan dalam pengembangan sistem yang digunakan untuk penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan Bab yang membahas tentang tinjauan organisasi, analisa proses berjalan, identifikasi kebutuhan, perancangan sistem, perancangan basis data dan dilanjutkan dengan perancangan antar muka yang akan dibuat pada sistem.

BAB V PENUTUP

Bab ini lebih menekankan pada sebuah kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan juga disertai saran dalam perancangan Sistem Informasi pengelolaan bantuan KORPRI pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

Didalam Daftar Pustakan akan dijabarkan tentang sumber literasi yang digunakan penulis dalam pembuatan laporan.